

Interelasi Subsistem Komunikasi Pemerintah dalam Pengembangan Kambing Kaligesing di Purworejo

Tatag Handaka & Hermin Indah Wahyuni

Universitas Trunojoyo

Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal, Bangkalan, Madura 69162

Email: tataghandaka@gmail.com

Abstract: *Government communication system encounters counseling and selling complexity. The aim of the study is to know how interrelation of government communication subsystem in encounter counseling and selling complexity in Kaligesing goat farming, Purworejo Regency. The study uses communication system in perspective of Niklas Luhmann with exploratory case study method. The result shows that counseling subsystem and breeding subsystem have not optimally interrelated. In the end, information, which produced and reproduced cannot effectively solve the complexity within the system.*

Keywords: *complexity, government communication subsystem, interrelation, Kaligesing goat farming*

Abstrak: *Sistem komunikasi pemerintah menghadapi kompleksitas penyuluhan dan penjualan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui interelasi subsistem komunikasi pemerintah dalam menghadapi kompleksitas penyuluhan dan penjualan dalam pengembangan kambing Kaligesing di Kabupaten Purworejo. Teori yang digunakan adalah subsistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann dengan metode studi kasus eksploratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa subsistem penyuluhan dan peternakan belum optimal dalam melakukan interelasi, sehingga informasi yang diproduksi dan direproduksi tidak efektif untuk menyelesaikan kompleksitas yang dihadapi.*

Kata kunci: *interelasi, kompleksitas, pengembangan kambing Kaligesing, subsistem komunikasi pemerintah*

Kabupaten Purworejo memiliki sentra pengembangan kambing nasional sekaligus sebagai plasma nutfah Purworejo di Kaligesing (Heriyadi, 2004, h. 1-24). Peternak di daerah ini telah mengembangkan kambing Kaligesing secara turun-temurun. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari penyuluhan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Purworejo (BPPKP, 2009).

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPPKP)

sudah memberikan banyak informasi ke peternak terkait pengembangan kambing Kaligesing (DPPKP, 2012; DPPKP, 2015). Informasi ini diproduksi oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan Bidang Peternakan yang ada di DPPKP berupa regulasi yang berguna bagi peternak dalam pengembangan kambing Kaligesing.

Peternak menilai bahwa pemerintah belum berbuat banyak terkait pengembangan kambing Kaligesing (Sambodo, 2013, h. 2). Mereka menilai bahwa informasi dari

pemerintah tidak banyak membantu dalam pengembangan ternak ini, serta seringkali tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Peternak mengaku materi penyuluhan tentang teknis pengembangan kambing Kaligesing dari Pemerintah masih kurang, sehingga harga jual kambing makin lama makin turun. Peternak juga merasa kesulitan ketika akan menjual susu kambing Kaligesing.

Penjelasan di atas merupakan kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi pemerintah. Informasi penyuluhan yang masih minim dan penjualan yang merugi merupakan kompleksitas dalam pengembangan kambing Kaligesing. Rumusan masalah yang diambil dari deskripsi ini adalah “bagaimana interelasi subsistem komunikasi pemerintah dalam menghadapi kompleksitas penyuluhan dan penjualan dalam pengembangan kambing Kaligesing di Kabupaten Purworejo?”

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann. Menurut Luhmann, sistem selalu berada dalam lingkungan (Littlejohn & Foss, 2008, h. 39-40; Littlejohn & Foss, 2009, h. 285-288; Griffin, 2012, h. 39-43), demikian juga dengan sistem komunikasi pemerintah. Lingkungan selalu lebih kompleks dibanding sistem (Luhmann, 1995, h. 181-182; Lee, 2000, h. 320; Hardiman, 2008, h. 1-12; Sitorus, 2008, h. 17-36). Lingkungan terdiri banyak informasi yang kompleks, di mana tidak semua informasi bermanfaat untuk sistem. Maka, sistem harus mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan.

Sistem menentukan batas-batas dirinya, agar ia bisa dibedakan dengan sistem lain (Luhmann, 1989, h. 28-29; King & Thornhill, 2006, h. 200), serta agar ia bisa membedakan dirinya dengan lingkungan. Pada konteks ini sistem bersifat tertutup (Luhmann, 2002, h. 160-161; Luhmann, 2000, h. 11), namun ia perlu mengambil informasi lingkungan yang akan dijadikan *input* untuk produksi informasi. Di dalam hal ini, maka sistem bersifat terbuka. Sistem memang dituntut untuk tertutup namun sekaligus terbuka.

Sistem terdiri dari berbagai subsistem yang membangun dirinya (Viskovatoff, 1999, h. 481-516). Subsistem yang ada dalam sistem berinterelasi dalam mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan. Mereka juga berinterelasi dalam memproduksi dan mereproduksi informasi menjadi regulasi yang diharapkan dapat menyelesaikan kompleksitas yang dihadapi.

Penelitian tentang sistem komunikasi pernah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian tentang sistem komunikasi yang berkaitan dengan bencana, khususnya dalam keadaan tanggap darurat untuk mengurangi risiko bencana (Lestari, Sembiring, Prabowo, Wibawa & Hindariningrum, 2013, h. 139-157); sistem komunikasi dan perilaku petani dalam merespons kebijakan harga gabah di Kabupaten Bantul (Yamin, 2015); sistem komunikasi pertanian di Provinsi Maluku (Kaliky, 2012); sistem komunikasi yang berkaitan dengan organisasi (Desautel, 2008); sistem komunikasi dalam kesehatan (Han, 2008); sistem komunikasi yang

dimediasikan komputer/CMC (Holton, 2009); sistem komunikasi dalam kaitan dengan modal sosial (Handaka, Wahyuni, Sulastri & Wiryono, 2015, h. 307-315); dan kompleksitas sistem komunikasi pemerintah (Handaka, Wahyuni, Sulastri & Wiryono, 2016, h. 88-96).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kasus eksploratif (*explorative case study*). Studi kasus sering digambarkan sebagai eksplorasi sebuah “sistem terbatas” (Bloor & Wood, 2006, h. 27). Metode ini digunakan untuk meneliti hal tunggal (Schostak, 2006, h. 21), misalnya interelasi sistem komunikasi pemerintah. Studi kasus juga dicirikan dengan deskripsi intensif dan holistik yang merupakan analisis pada unit tunggal (Jones, Torres & Arminio, 2006, h. 53).

Tujuan studi kasus adalah memetakan, menggambarkan, dan mencirikan kejadian dan aktivitas (McKie, 2002, h. 268). Studi kasus menekankan pada proses pemahaman seperti mereka berada dalam konteksnya (Hartley, 2004, h. 332). Metode ini memahami ‘kasus’ lebih penting daripada menggeneralisasi pada populasi yang lebih besar (Stark & Torrance, 2005, h. 33). Tahap studi kasus meliputi pengumpulan data mentah, penyusunan deskripsi kasus, dan menulis narasi deskriptif (Patton, 2002, h. 450).

Kabupaten Purworejo dipilih sebagai populasi penelitian karena menjadi sentra pengembangan kambing Kaligesing nasional. Sampel penelitian diambil dari sebelas

kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada. Sampel ini dipilih untuk mewakili wilayah pengembangan kambing Kaligesing di dataran rendah, sedang, dan tinggi.

Informan penelitian adalah Kepala DPPKP, Ketua KJF, Ketua Bidang Peternakan DPPKP, dokter hewan, paramedis, koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) *Breeding Center (BC)*, Ketua *Village Breeding Center (VBC)*, Ketua Kelompok Tani (poktan), dan peternak. Informan ini dipilih karena memiliki informasi yang memadai (*rich information*) tentang sistem komunikasi pemerintah.

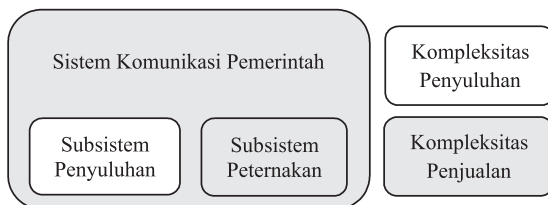
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi yang dilakukan selama tiga bulan, mulai dari bulan September hingga November 2015. Teknik analisis data dimulai dengan transkrip wawancara, klasifikasi data wawancara, dan melakukan analisis menggunakan Teori Sistem Komunikasi dalam perspektif Luhmann. Unit analisis adalah organisasi KJF dan Bidang Peternakan yang ada di DPPKP. Hasil penelitian studi kasus berupa narasi deskriptif.

Analisis data dimulai dari tahap pertama, pengumpulan data yang terdiri dari seluruh informasi tentang orang, program, dan organisasi DPPKP, KJF, dan BPK. Tahap kedua, reduksi data mentah atas kasus yang telah diorganisasi dan diklasifikasi lalu diedit ke dalam *file* yang tertata dan mudah diakses. Tahap ketiga, studi kasus sudah terbaca, gambaran deskriptif atau narasi tentang interelasi subsystem komunikasi pemerintah. Semua informasi

mudah diakses pembaca untuk memahami kasus dalam seluruh keunikannya. Cerita tentang kasus interelasi subsistem komunikasi pemerintah dideskripsikan secara kronologis dan disajikan secara tematis.

HASIL

Sistem selalu berada dalam lingkungan, demikian juga dengan sistem komunikasi pemerintah. Ia berada dalam lingkungan pengembangan kambing Kaligesing. Lingkungan ini terdiri dari berbagai kompleksitas. Sistem komunikasi pemerintah terdiri dari dua subsistem, yaitu penyuluhan dan peternakan. Relasi sistem komunikasi pemerintah dan kompleksitas lingkungan dijelaskan dalam Gambar 1.

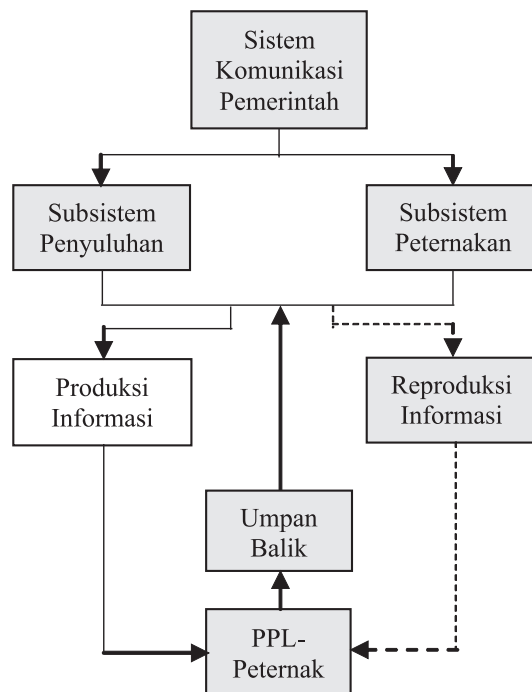


Gambar 1 Subsistem Komunikasi Pemerintah dan Kompleksitas Lingkungan
Sumber: Data primer (2015)

Sistem komunikasi pemerintah menghadapi kompleksitas lingkungan, yaitu kompleksitas penyuluhan dan penjualan. Kompleksitas penyuluhan terdiri dari: pelatihan PPL yang dilaksanakan KJF, *Village Breeding Center (VBC)*, penentuan kelas kemampuan poktan, program Penetapan Wilayah Sumber Bibit (PWSB), mekanisme evaluasi penyuluhan yang tidak optimal, kesehatan hewan (keswan), dan biaya operasional BPK yang minim. Kompleksitas penjualan juga terdiri dari dua hal, yaitu penjualan kambing Kaligesing yang tidak

menguntungkan peternak dan penjualan susu kambing Kaligesing yang sulit.

Sistem komunikasi pemerintah adalah proses produksi dan reproduksi informasi pengembangan kambing Kaligesing yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Proses produksi dan reproduksi sistem komunikasi Pemerintah dijelaskan dalam Gambar 2.



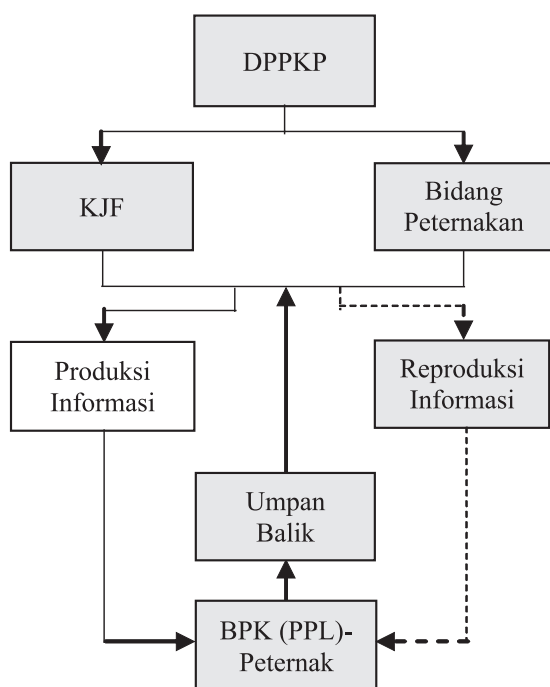
Gambar 2 Sistem Komunikasi Pemerintah
Sumber: Data primer (2015)

Sistem komunikasi pemerintah (subsistem penyuluhan dan subsistem peternakan) menyeleksi serta mereduksi informasi lingkungan untuk mendapat *input* yang diperlukan. Subsistem penyuluhan dan subsistem peternakan berinterelasi dalam mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan. Subsistem hanya mengambil informasi lingkungan yang dibutuhkan untuk dirinya. Subsistem menggunakan *input* lingkungan untuk memproduksi informasi. Informasi ini berupa regulasi yang diharapkan

dapat menyelesaikan kompleksitas yang dihadapi sistem.

Informasi ini kemudian didistribusikan oleh PPL ke peternak, biasanya melalui poktan. Interaksi PPL dan peternak ini akan menghasilkan umpan balik (*feedback*), yang bisa berupa penilaian, kritik, masukan, harapan, atau permintaan peternak yang digunakan sistem untuk mereproduksi informasi berikutnya (garis putus-putus dalam Gambar 2).

Informasi hasil reproduksi sistem ini kembali didistribusikan oleh PPL ke peternak melalui poktan. Interaksi PPL dan peternak akan menghasilkan umpan balik yang digunakan sistem untuk mereproduksi informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses produksi dan reproduksi sistem komunikasi pemerintah ini berjalan. Struktur yang menjalankan sistem komunikasi pemerintah dijelaskan dalam Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Komunikasi Pemerintah
Sumber: Data primer (2015)

Subsistem penyuluhan dijalankan oleh struktur KJF dan BPK, sedangkan subsistem peternakan dijalankan oleh struktur Bidang Peternakan. KJF dan Bidang Peternakan berada di bawah DPPKP. BPK berada di tiap kecamatan, beranggotakan para PPL dan dipimpin oleh koordinator. BPK adalah lembaga fungsional (nonstruktural) sehingga tidak memiliki stempel lembaga.

DPPKP, lembaga yang menaungi KJF dan Bidang Peternakan, adalah lembaga teknis yang merencanakan isi pesan pengembangan peternakan. DPPKP tidak memiliki tenaga fungsional penyuluhan sebelum PPL yang semula di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) dilebur ke DPPKP. DPPKP hanya merencanakan perencanaan teknis sedangkan pelaksana penyuluhan dilaksanakan oleh BPPKP.

Pemerintah menilai hal ini tidak efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan. Maka, PPL yang ada di BPPKP dilebur ke dalam DPPKP dan diwadahi dalam struktur KJF dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan bisa dilaksanakan lebih sinergis karena berada dalam satu atap DPPKP.

Pembubaran BPPKP adalah regulasi pemerintah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan lebih sinergis. Namun, ada dua persoalan yang mengemuka dalam pembubaran BPPKP. *Pertama*, pemerintah telah mereduksi persoalan penyuluhan ke dalam lembaga bernama KJF. Berbagai Bidang Penyuluhan di BPPKP tentu tidak sebanding dengan

KJF. Lembaga ini hanya terdiri dari 5 PPL yang membawahi wilayah binaan (wibi). Tiap PPL KJF memiliki wibi rata-rata tiga kecamatan. Peran dari masing-masing PPL adalah sebagai berikut: 1) Koordinator KJF merangkap urusan program; 2) Koordinator penyuluhan perikanan merangkap urusan supervisi perikanan; 3) Urusan sumber daya perikanan; 4) Urusan supervisi pertanian; dan 5) Urusan sumber daya pertanian.

Kedua, tujuan pemerintah agar pelaksanaan program pembangunan peternakan menjadi sinergis masih perlu dipertanyakan. KJF yang sudah berada di DPPKP tidak serta merta membuat perencanaan pembangunan peternakan menjadi lebih sinergis. Terutama bila ditelisik interelasi antara KJF dan Bidang Peternakan di DPPKP. Interelasi tersebut bisa dilihat dalam kompleksitas penyuluhan, yaitu: pelatihan PPL yang dilaksanakan KJF, VBC, penentuan kelas kemampuan poktan, dan program PWSB.

Kasus pertama adalah pelatihan KJF untuk PPL. KJF telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan PPL dalam bidang peternakan. KJF tidak melibatkan bidang peternakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.

Kalau *training* tidak ada, tapi kalau diminta (KJF, pen.) ya kita isi materi, karena *training* itu yang pegang orang KJF langsung. Kalau saya diminta mengisi materi (*training*, pen.), saya *kasih*, kalau tidak ya tidak. *Wong* saya tidak punya anggaran (*training*, pen.). Anggaran *training* itu satu paket di sana (KJF, pen.), bukan kami yang mengolah pakatnya, terus pelaksanaannya di sana. (WD-DP, 20 November 2015)

KJF hanya mengundang Bidang Peternakan untuk memberi materi pelatihan. Bila tidak diundang KJF, maka Bidang Peternakan tidak terlibat dalam pelatihan ini. Padahal persoalan peternakan yang menyangkut keswan sangat dominan. Keswan menjadi bagian dari Bidang Peternakan, yaitu Sie Keswan.

KJF juga tidak melibatkan Bidang Peternakan dalam penyusunan program dan rencana kerja penyuluhan. Penyuluhan Bidang Keswan direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing PPL. Hal ini bisa dilihat dalam penyusunan program dan rencana kerja yang disusun PPL.

Kalau penyusunan materi (penyuluhan, pen.), kami tidak terlibat. Kami (Bidang Peternakan, pen.) hanya dimintai untuk semacam narasumber, menyampaikan materi, misalnya budi daya, pakan, unggas, dan sebagainya. (WD-DP, 20 November 2015)

Kalau menyusun materi penyuluhan tidak, tapi kalau untuk penyegaran penyuluh *iya*. Cuma *problem*-nya karena kesehatan (ternak kambing Kaligesing, pen.) memang teknis sekali. Jelas jauh dari pendidikan PPL, tidak akan *nyambung* juga dengan penyuluhnya. (KS-DP, 24 November 2015)

Kasus kedua adalah pendirian VBC yang dilaksanakan Bidang Peternakan. Pendirian VBC dilakukan Bidang Peternakan tanpa berkoordinasi dengan KJF. Padahal penyuluhan dan pendampingan, setelah VBC didirikan, dilaksanakan PPL BPK. VBC dilaksanakan oleh poktan dan selanjutnya dalam pengembangan kambing Kaligesing peternak didampingi PPL BPK. Di sisi lain, ternyata KJF tidak tahu-menahu tentang VBC.

Kok saya bisa tidak tahu itu (VBC, pen.). Saya tidak tahu persis itu untuk apa, anggarannya, tahun berapa didirikan, saya tidak tahu persis. (PN-DP, 29 November 2015)

KJF yang tidak mengetahui pendirian VBC mengindikasikan bahwa Bidang Peternakan ketika mendirikan VBC tidak berkoordinasi dengannya. Bila PPL BPK terlibat dalam penyuluhan dan pendampingan setelah VBC berdiri, mengindikasikan bahwa Bidang Peternakan langsung berkoordinasi dengan BPK tanpa melalui KJF.

Kasus ketiga adalah penentuan kelas kemampuan poktan yang terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Bidang Peternakan pernah ditegur tim verifikasi PWSB dari Pemerintah Pusat tentang kelas kemampuan poktan. Tim menilai bahwa penentuan kelas kemampuan tidak divalidasi secara berkala. Mereka menemukan poktan yang sudah lama sekali tidak naik/berubah kelas kemampuannya. Lantas Bidang Peternakan melakukan validasi sendiri kelas kemampuan poktan tersebut tanpa melibatkan KJF.

Tim dari pusat menanyakan kelas kelompok tani ke peternak. Anggota poktan menjawab *kok* dari zaman *mbah buyut* (kakek, pen.), kelas poktan saya masih pemula saja, orang pusat juga *ketawa*. Yang menilai kelas pemula siapa? Kepala desa, camat, bupati, ditanyakan saya tidak bisa jawab, kelompok juga tidak bisa jawab. Saya tanya PPL setelah selesai acara, tolong kelompok tani ini dinilai kelasnya, malah jawabannya sudah pak. *Lha* dimana arsipnya? Masih di kantor (BPK, pen.) belum *dikasih*kan. *Nah*, seharusnya nilai poktan entah naik kelas atau tidak, diberikan biar kelompok taninya tahu. (WD-DP, 20 November 2015)

Ya orang KJF itu Pak, makanya saya tanya PPL, tolong kelas poktan ditindaklanjuti, apakah ini masih pemula, madya, lanjut, atau

utama. SK (Surat Keputusan, pen.) kelas kelompok tani bisa ditempel di sekretariat (poktan, pen.). (WD-DP, 20 November 2015)

Gejala ini mengindikasikan bahwa KJF dan Bidang Peternakan belum sepakat dengan kriteria dan prosedur penentuan kelas kemampuan poktan, bagaimana *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengurusan kelas kemampuan poktan. Sehingga KJF dan Bidang Peternakan masih belum bisa memahami prosedur baku dalam penentuan kelas kemampuan untuk dikategorikan dalam kelas kemampuan pemula, lanjut, madya, atau utama.

Kasus keempat adalah perencanaan PWSB (DPPKP, 2015). Bidang Peternakan merencanakan PWSB dan sudah diverifikasi Pemerintah Pusat. Ketika tim verifikasi datang ke lokasi PWSB, Bidang Peternakan sudah memberitahu agenda tersebut ke BPK Kaligesing. Koordinator BPK hadir tapi tidak ada anggota KJF yang hadir. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa Bidang Peternakan sudah berkoordinasi dengan KJF tapi tidak ada yang hadir atau Bidang Peternakan langsung berkoordinasi dengan BPK.

Subsystem penyuluhan sudah berada dalam satu wadah dengan subsystem peternakan. Subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan sudah melakukan interelasi dalam menghadapi kompleksitas penyuluhan. Tapi interelasi antarkedua subsystem masih belum optimal.

Iya, yang satu dinas saja untuk koordinasi susah, apalagi yang beda dinas, egonya muncul. Makanya saya sering tanya wibi, yang disuluhkan teman-teman penyuluh itu

sebenarnya apa? Apakah yang disuluhkan itu kegiatan dinas atau sesuai selera mereka? Ketika komoditasnya A dan yang disuluhkan C, D, E ya tidak *nyambung*, mau *ketemu* di mana, mau dikoordinasikan dengan cara apapun ya tidak akan *ketemu*. (KS-DP, 24 November 2015)

Kita *tembusi*, kita informasikan, masalah datang atau tidak ya *monggo*, tapi kita mau mengadakan pelatihan tentang pakan ternak atau macam-macam itu kita informasikan, termasuk koordinatonya tingkat kecamatan (BPK, pen.). Masalah dia (KJF, pen.) hadir atau tidak, kita sudah sampaikan, saya saja sering pertemuan masalah SPR (Sentra Peternakan Rakyat, pen.) mengundang KJF. Kita beri undangan, masalah datang atau tidak mau tahu, urusannya dia. Kalau dia tidak datang ya *monggo*, tapi kita sudah sampaikan kalau mau mengadakan pelatihan SPR. (WD-DP, 20 November 2015)

Kita sampaikan ke tiap koordinator (BPK, pen.), maksud saya biar koordinator bisa menyampaikan di lingkungan masing-masing. Saya undang KJF ketika ada kegiatan SPR di Kecamatan Kaligesing. Saya minta KJF untuk datang, tapi mereka tidak datang, terus bagaimana saya. (WD-DP, 20 November 2015)

Persoalan peternakan kompleks sekali. Jadi sementara ini, peternakan *in shaa Allah* jalan sendiri, berjuang sendiri, bertarung sendiri. (KS-DP, 24 November 2015)

Bila tujuan Pemerintah menggabungkan PPL BPPKP ke DPPKP agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan menjadi lebih sinergis, persoalan-persoalan itu tidak boleh terjadi. Artinya, meskipun PPL sudah berada dalam satu atap DPPKP, sinergi itu tidak terwujud seperti yang diharapkan. KJF dan Bidang Peternakan masih sering berjalan sendiri-sendiri.

Interelasi KJF, Bidang Peternakan, dan BPK

Struktur organisasi DPPKP tidak menunjukkan secara eksplisit relasi antara KJF dan BPK. Peraturan Bupati (Perbup) No. 91/2013 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja DPPKP Kabupaten Purworejo juga tidak mengatur secara jelas relasi antara kedua lembaga ini, padahal kegiatan penyuluhan melibatkan KJF dan BPK secara intens.

Masing-masing BPK memiliki persepsi sendiri tentang bagaimana sifat relasi antara KJF dan BPK. BPK hanya tahu bahwa relasi KJF dan BPK sebatas KJF mengoordinasi semua BPK yang ada. Ada PPL yang malah tidak begitu peduli dengan sifat relasi antara kedua lembaga ini.

Ya, sebenarnya KJF itu mengoordinasi penyuluh, mengoordinasi semua penyuluh yang fungsional, penyuluh pertanian, jadi mengoordinasi BPK. (MS-BG, 2 Oktober 2015).

Kalau kami sebagai PPL tidak begitu mengurus itu. Kami penyuluh terutama yang diurus konsentrasi ke petani. Kita tidak mengurus dengan Dinas seperti itu, yang dipikirkan teman-teman itu bagaimana dengan petani. (DW-BR, 16 November 2015)

BPK menilai bahwa tetap ada relasi antara KJF dan BPK. Namun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi penyuluhan sering berubah sehingga membuat BPK bingung dengan sifat koordinasinya. BPK menilai ada *gap* antar berbagai bidang di DPPKP.

Koordinasinya ya, selalu ada cuma karena dinasnya kita selalu berganti-ganti. Dari Dinas Pertanian, Pertanian Kehutanan, terus Dinas Pertanian dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan. Terus Dinas Peternakan sendiri sudah ganti berapa kali ya, jadi ya repot juga. Jadi ya, seperti ada *gap*, berkelompok sendiri-sendiri sepertinya *lho*, ya. Seperti itu kalau mau *ngomong* ya, Dinas memang berganti-ganti, makanya kita bingung. (ST-BY, 21 Oktober 2015)

Ada BPK yang memahami bahwa relasi BPK adalah langsung dengan Kepala DPPKP. BPK bertanggungjawab ke Kepala DPPKP,

tidak ke KJF atau Bidang di DPPKP. BPK tidak tahu secara pasti bagaimana sebenarnya relasi antara BPK dan KJF serta peraturan yang berlaku sekarang.

Gejala ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan yang mengatur relasi antarstruktur di DPPKP tidak dikomunikasikan kepada semua BPK. Regulasi yang dibuat tidak disertai dengan mekanisme untuk mendiseminasikannya.

Saya tidak tahu sistem yang sekarang, kalau yang dulu itu penyuluh langsung di garis lurus dari Kepala Dinas turun ke bawah. Posisi langsung di bawah, jadi tidak di bawah Bidang, yang dulu, yang sekarang saya tidak tahu persis, saya tidak melihat di mana struktur organisasinya. (TT-BR, 23 Oktober 2015)

Salah satu contoh relasi ini adalah pertemuan antara koordinator BPK dengan KJF secara rutin tiap bulan. PPL BPK juga diwajibkan membuat laporan kegiatan tiap akhir bulan ke KJF. Laporan ini menjelaskan kegiatan PPL selama sebulan berlangsung. Rutinitas ini menunjukkan relasi yang terus-menerus antara keduanya. Koordinator BPK akan meneruskan informasi ke PPL setelah mengikuti pertemuan dengan KJF.

Sewaktu-waktu, apabila pembahasan itu masuk ke sana (KJF, pen.). Hampir-hampir koordinator tidak pernah di kantor *kok* Pak, tapi rapat terus. *Rapaaatt...* terus, *rapaaatt...* terus, jadi satu minggu itu *minim* rapatnya dua kali. (WS-PW, 10 November 2015)

Empat bidang di DPPKP juga berelasi dengan BPK, baik Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Sarana Prasarana dan Penanganan Pasca Panen, Bidang Peternakan, serta Bidang Kelautan dan Perikanan. Relasi ini berkaitan dengan program kerja masing-masing bidang. Bidang tidak memiliki tenaga fungsional,

sehingga ketika petani/peternak ingin berkomunikasi harus melalui BPK.

Keempat Bidang di DPPKP akan memberi pekerjaan ke BPK setiap tahun yang seringkali dilakukan secara serentak. Koordinator BPK yang bertanggungjawab untuk membuat laporan kegiatan tiap bulan dan seringkali laporan yang berbeda-beda tersebut harus diselesaikan dalam waktu bersamaan.

Ke saya semua, kalau misal semua memerintah pada saat yang sama, bingung, Mas. Tiap bulan harus melaporkan statistik, luas tanam, luas panen, dan produksi, kalau saya *kan* semua. Cuma saya *kan* diminta statistik ternak, laporan pupuk juga. (ED-KM, 6 Oktober 2015)

Koordinator BPK, selain membuat laporan kegiatan untuk KJF dan semua bidang, juga masih dibebani dengan penyuluhan di wibi. Beban pekerjaan koordinator menjadi semakin menumpuk.

Di situ setiap bulan kegiatannya, tapi ya ini kadang sudah tidak mesti rutin karena sekarang secara administrasi banyak dari pemerintah. Sekarang ini kegiatan administratif cukup banyak dan cukup menyita waktu. Jadi kalau terlalu sering kumpul itu ya *ngremeki* (merepotkan, pen.). Ya, seperti saya misalnya koordinator itu *kan* juga diberi wibi juga. (TT-BR, 23 Oktober 2015)

BPK menilai bahwa KJF dan bidang-bidang di DPPKP tidak memberikan tugas yang fokus dan jelas. Baik KJF, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Peternakan, dan Bidang Kelautan Perikanan mengusulkan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Usulan pekerjaan ini tidak mengerucut menjadi satu tujuan.

Tapi kalau mengusulkan itu sendiri-sendiri, sini-sana, sini-sana, itu memang repot. Dinas juga harus fokus ke satu, Pak. Ini dari Dinas tidak fokus ke satu. Ini juga ada yang dari Sarpras (bidang sarana prasarana, pen.) itu

buat sendiri, KJF buat sendiri, kemudian Bidang Peternakan buat sendiri, Pertanian buat sendiri. Pusing, Pak, penyuluhnya. Semuanya *ditaruh* ke penyuluh, *kan* ujung tombaknya penyuluh. (WS-PW, 10 November 2015)

BPK menilai bahwa program kerja KJF dan bidang tidak sinkron dan tidak ada koordinasi. BPK sebagai pelaksana lapangan bisa mengetahui tentang persoalan ini. Pengakuan BPK ini mengindikasikan bahwa antara KJF dan Bidang Peternakan tidak berkoordinasi ketika menyusun program kerja sehingga program kerja mereka dinilai tidak sinkron oleh BPK. PPL BPK tentu jauh lebih memahami apa yang terjadi di lapangan karena mereka yang tahu persis praktik dari kebijakan itu.

BPK berharap, sebelum KJF dan bidang memberi tugas ke BPK, sudah ada kesamaan persepsi dan program kerja sehingga tidak menimbulkan kebingungan. BPK mengumpulkan semua PPL ketika menyusun program kerja dan seharusnya KJF dan Bidang Peternakan juga mengikuti hal tersebut. Melalui koordinasi dengan PPL dapat dilakukan sinkronisasi usulan-usulan sehingga menjadi rencana kerja dan program penyuluhan yang komprehensif.

Harapan saya semua program-program dari dinas, KJF, kemudian dari bidang itu dibuat *duluan*. Kalau buat *kan* bersama-sama, jadi dibuat bersama-sama, kemudian masing-masing mempunyai hasil musyawarah. (WS-PW, 10 November 2015)

PPL BPK sudah bekerja sebaik mungkin dengan jumlah pekerjaan yang begitu banyak. PPL harus membagi waktu antara memberi penyuluhan dan menyusun laporan namun kadang pekerjaan mereka tidak diapresiasi oleh Dinas. “Kerja

penyuluh itu penyuluhan saja, kadang-kadang tidak dianggap oleh orang dinas *kok*” (DR-BN, 10 November 2015).

Pada kasus tertentu, BPK tidak dilibatkan dalam program kerja Bidang Peternakan. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat bantuan kambing Kaligesing ke poktan/peternak. BPK hanya dilibatkan dalam pembubuhan tanda tangan saat pembuatan proposal bantuan yang dibuat poktan. Sebaliknya, BPK tidak tahu menahu hingga tiba-tiba bantuan kambing Kaligesing sudah datang ke poktan. Apabila bantuan kambing Kaligesing sudah sampai ke peternak, maka PPL BPK diminta untuk memberi penyuluhan. Tanggung jawab penyuluhan ada di PPL yang menjadi wibi masing-masing, di sisi lain PPL tidak tahu-menahu tentang proses bantuan ini.

BPK berharap mestinya PPL mengetahui semua kegiatan DPPKP. PPL menilai selama ini mereka kadang tidak mengetahui program kerja DPPKP dan bahkan pernah mendapatkan informasi justru dari petani yang tahu lebih dahulu.

Harusnya ya, semua kegiatan yang menjadi program Dinas, paling tidak penyuluh tahu. Selama ini *kan* belum tentu tahu, sehingga program apa *to*, malah kadang-kadang petaninya langsung ke sana (DPPKP, pen.). Malah petaninya tahu, penyuluhnya belum tahu. (PR-BN, 18 November 2015)

Bentuk relasi antara KJF, Bidang Peternakan, dan BPK juga tidak memiliki pola yang baku. Kepala bidang di DPPKP bisa secara tiba-tiba langsung ke BPK dan meminta bantuan PPL untuk menghadiri program kerja mereka. Sementara BPK tidak tahu-menahu program kerja tersebut, demikian juga dengan PPL.

Begini, seperti kemarin, dari Bidang Peternakan ada kegiatan tentang ternak korban yang di Kecamatan Pituruh. Diadakan pelatihan untuk mengukur kesra (kesejahteraan rakyat, pen.). Itu mengadakan pelatihan, saya tidak tahu, tiba-tiba dari dinas langsung ke sini. Mereka (Kepala Sie di DPPKP) punya bantuan ini, minta bantuan koordinator. Koordinator minta salah satu penyuluhnya, tolong ini dihadiri kegiatan dari Peternakan, seperti itu.” (KT-PT, 9 Oktober 2015)

BPK menilai bahwa keadaan BPK dari dulu tidak diperhatikan eksistensinya. BPK sudah bekerja untuk semua program kerja baik dari KJF atau bidang. Beban kerja mereka banyak karena berasal dari berbagai bidang namun DPPKP masih belum mengapresiasi kerja BPK. “Jadi BPK dari dulu sampai sekarang seperti ini. Dulu tidak diperhatikan, sekarang agak akan diperhatikan. Agak akan *lho*, katanya, itu baru katanya” (MS-BG, 2 Oktober 2015).

Struktur organisasi DPPKP tidak menunjukkan secara jelas interelasi antara KJF, Bidang Peternakan, dan BPK. KJF memiliki PPL yang ada di BPK untuk menjalankan program penyuluhan, namun Bidang Peternakan tidak memiliki PPL untuk menjalankan program kerjanya. Bidang Peternakan hanya memiliki tenaga medis dan paramedis dengan jumlah yang terbatas.

KJF, BPK, dan Bidang Peternakan juga merupakan lembaga yang berbeda sifatnya. KJF dan BPK adalah lembaga fungsional sehingga tidak memiliki stempel lembaga. Bila KJF berkegiatan menggunakan stempel DPPKP, sedang bila BPK berkegiatan menggunakan stempel kecamatan. Bidang Peternakan adalah lembaga struktural sehingga memiliki stempel lembaga.

PEMBAHASAN

Sistem komunikasi pemerintah telah mereduksi dan menyeleksi kompleksitas lingkungan pengembangan kambing Kaligesing. Sistem mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan yang bermanfaat untuk dirinya (von Groddeck, 2011, h. 66-86). Proses ini menunjukkan bahwa sistem menentukan batas-batas dirinya (Luhmann, 1992, h. 251-259). Ia menetapkan zona dalam kompleksitas lingkungan. Sistem komunikasi pemerintah berusaha agar tidak lebih kompleks dari lingkungan (Rothchild, 2009, h. 475-506; Besio & Pronzini, 2011, h. 18-41).

Sistem komunikasi pemerintah menentukan batas atau zonanya sehingga menggambarkan dirinya yang bersifat tertutup (Luhmann, 2000, h. 11; Luhmann, 2002, h. 160-161; Nobles & Schiff, 2004, h. 221-244). Ia menetapkan batas dirinya dengan tidak mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan yang di luar kepentingannya, di luar *core business*-nya. Subsystem yang ada di dalamnya juga hanya mengurus informasi yang berkaitan dengan dirinya.

Subsystem yang ada dalam sistem komunikasi pemerintah, baik subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan, telah mereduksi dan menyeleksi kompleksitas lingkungan. Masing-masing subsystem telah memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Subsystem penyuluhan dalam memproduksi informasi juga berinterelasi dengan subsystem peternakan meskipun interelasi ini belum optimal.

Sistem dalam menentukan batas dirinya, bisa diketahui dari reduksi dan seleksi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain reduksi dan seleksi, batas sistem juga bisa diketahui dari interelasi antarkedua subsistem. Ketersediaan subsistem berinterelasi menggambarkan bahwa subsistem menyadari ada informasi yang tidak ia miliki. Informasi yang ia butuhkan ada dalam subsistem lain.

Interelasi juga mengindikasikan tentang sifat sistem yang tertutup dan sekaligus terbuka. Subsistem penyuluhan yang memproduksi dan mereproduksi informasi tanpa berinterelasi dengan subsistem peternakan, merupakan bentuk subsistem yang tertutup. Subsistem penyuluhan yang membuka interelasi dengan subsistem peternakan adalah bentuk subsistem yang terbuka.

Subsistem yang frekuensi interelasi dengan subsistem lain lebih banyak, menggambarkan dirinya lebih bersifat terbuka. Subsistem dengan frekuensi interelasi sedikit menandakan dirinya lebih bersifat tertutup. Subsistem yang memaksa diri tertutup, padahal tidak memiliki cukup informasi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan, akan menghadapi kesulitan dalam memproduksi dan mereproduksi informasi yang sesuai dengan kompleksitasnya.

Teori Sistem tidak menjelaskan secara eksplisit sebab-sebab yang mendorong sistem berinterelasi dengan sistem lain (Luhmann, 1989, h. 28-29; King & Thornhill, 2006, h. 200). Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsistem berinterelasi dengan subsistem lain karena

kompleksitas yang dihadapi. Kadang tidak semua kompleksitas lingkungan bisa diselesaikan hanya oleh subsistem tertentu. Kondisi ini mendorong subsistem harus berinterelasi dengan subsistem lain untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan.

Kompleksitas lingkungan berupa kesehatan kambing Kaligesing, tidak bisa diselesaikan hanya oleh subsistem penyuluhan. Informasi tentang keswan banyak dimiliki oleh subsistem peternakan. Meskipun demikian, subsistem peternakan juga tidak bisa sendiri memproduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan kompleksitas ini. PPL yang berperan dalam mendistribusikan informasi keswan ada di subsistem penyuluhan.

Bila subsistem tidak berinterelasi dengan subsistem lain dalam menyelesaikan kompleksitas lingkungan yang seperti ini, maka informasi yang diproduksi dan direproduksi hanya menyelesaikan sebagian kompleksitasnya. Sistem tidak pernah benar-benar menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Informasi yang diproduksi sistem mampu menyelesaikan kompleksitas lingkungan tetapi hanya bersifat parsial. Subsistem yang tidak berinterelasi ketika menghadapi kompleksitas lingkungan semacam ini hanya akan memproduksi dan mereproduksi informasi yang tidak lengkap.

Teori Sistem tidak menjelaskan secara detail tentang batas interelasi subsistem (Luhmann, 1995, h. 181-182; Lee, 2000, h. 320). Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas interelasi subsistem adalah ketika informasi yang dimiliki oleh masing-masing

subsistem bisa diproduksi dan direproduksi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Masing-masing subsistem menakar seberapa banyak informasi yang dimiliki untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Interelasi subsistem dalam produksi dan reproduksi akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap.

Subsistem komunikasi pemerintah belum mengembangkan interelasi yang optimal, sehingga informasi yang dihasilkan cenderung mewakili kepentingan subsistem penyuluhan atau subsistem peternakan saja. Regulasi tentang pelatihan PPL yang diproduksi subsistem penyuluhan dinilai PPL tidak sesuai dengan kompleksitas lingkungan yang dihadapi, yaitu keswan. Hal ini karena pelatihan lebih banyak dikelola oleh subsistem penyuluhan. Produksi informasi sangat sedikit melibatkan subsistem peternakan.

Di sisi lain, subsistem peternakan lebih menguasai kompleksitas keswan. Ketiadaan interelasi subsistem dalam melakukan produksi informasi mengakibatkan informasi keswan terpinggirkan dalam regulasi pelatihan PPL. Hal ini akan terus berulang karena reproduksi informasi oleh subsistem penyuluhan tidak berinterelasi dengan subsistem peternakan.

Keswan adalah persoalan yang jamak dihadapi peternak. Hampir semua peternak pernah mengalami kambingnya terserang penyakit. Mereka merasa kesulitan menghadapi berbagai penyakit yang sering menyerang ternaknya. Peternak sangat berharap pemerintah bisa membantu dalam mengatasi persoalan ini.

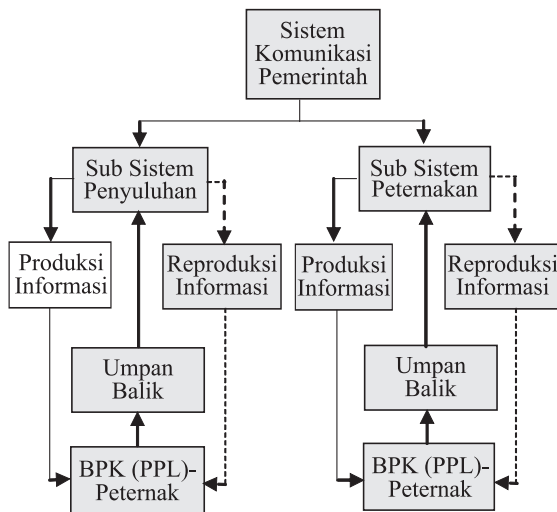
Masing-masing subsistem memiliki informasi berbeda terkait pengembangan kambing Kaligesing. Subsistem penyuluhan memiliki banyak informasi tentang program penyuluhan, kelas kemampuan poktan, potensi ternak di masing-masing wibi BPK, dan hambatan yang dihadapi peternak dalam pengembangan kambing Kaligesing. Sementara subsistem peternakan kaya dengan informasi keswan, penjualan kambing Kaligesing, kontes kambing Kaligesing yang rutin diadakan dalam skala nasional dan lokal, serta bantuan kambing Kaligesing (jalur birokrasi dan jalur aspirasi).

Apabila subsistem ini berinterelasi, maka masing-masing subsistem akan saling melengkapi. Produksi dan reproduksi informasi juga akan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi. Tetapi bila sebaliknya yang terjadi, kedua subsistem tidak optimal dalam berinterelasi, sehingga hanya akan menghasilkan informasi yang tidak efektif untuk menyelesaikan kompleksitas.

Saat subsistem penyuluhan mendorong peternak untuk pemerah dan mengolah susu kambing Kaligesing, peternak kemudian pemerah susu kambing tapi tidak bisa menjual dan mengolahnya. Subsistem penyuluhan tidak mereduksi dan menyeleksi umpan balik ini untuk mereproduksi informasi berikutnya, sehingga kompleksitas ini terus berlangsung tanpa ada regulasi yang menyelesaikannya. Seharusnya subsistem peternakan memiliki kapasitas untuk mengatasi kompleksitas ini. Hal ini tentu akan berbeda apabila sejak awal kedua subsistem berinterelasi ketika

akan memproduksi informasi pemerahan dan pengolahan susu kambing Kaligesing. Kedua subsistem bisa saling memperkaya informasi terkait regulasi yang akan diproduksi.

Bila subsistem penyuluhan dan subsistem peternakan tidak optimal berinterelasi dalam produksi dan reproduksi informasi, maka masing-masing subsistem akan memproduksi dan mereproduksi sendiri-sendiri informasinya. Interelasi subsistem yang tidak optimal dijelaskan dalam Gambar 4.



Gambar 4 Interelasi Subsistem Komunikasi Pemerintah

Sumber: Data primer (2015)

Subsistem penyuluhan hanya fokus pada produksi dan reproduksi informasinya sendiri. Demikian juga subsistem peternakan. Padahal, kompleksitas lingkungan yang dihadapi bukan sekadar persoalan di sekitar penyuluhan atau peternakan, tetapi juga meliputi persoalan dalam subsistem penyuluhan dan subsistem peternakan.

Subsistem penyuluhan mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga dilakukan oleh subsistem peternakan.

Produksi informasi hanya berdasar informasi menurut cara pandang dirinya sehingga apabila ada umpan balik lingkungan, reproduksi informasi juga terbatas pada perspektif dirinya dalam memahami kompleksitas lingkungan. Demikian produksi dan reproduksi masing-masing subsistem berulang.

Kompleksitas pelatihan PPL, pendirian VBC, penentuan kelas kemampuan poktan, pelaksanaan PWSB, evaluasi penyuluhan, biaya operasional BPK yang minim, keswan, penjualan kambing Kaligesing yang sering merugikan peternak, dan penjualan susu kambing bukan sekadar persoalan penyuluhan atau peternakan. Namun kompleksitas ini benar-benar menuntut perhatian subsistem penyuluhan dan subsistem peternakan.

Informasi yang dihasilkan sistem komunikasi pemerintah selama ini sejatinya produksi dari salah satu subsistem di dalamnya. Kadang informasi berasal dari subsistem penyuluhan atau informasi dari subsistem peternakan. Informasi yang dihasilkan hanya mewakili salah satu subsistem yang ada di dalam subsistem komunikasi Pemerintah. Informasi yang dihasilkan bukan hasil dari interelasi subsistem penyuluhan dan subsistem peternakan.

Informasi yang diproduksi dan direproduksi sistem komunikasi pemerintah hanya fragmentatif. Ia hanya menyentuh sebagian kompleksitas yang dihadapi sistem komunikasi pemerintah. Informasi berupa regulasi pelatihan PPL hanya sekadar pelatihan tetapi tidak benar-benar membekali PPL untuk menyelesaikan

kompleksitas yang mereka hadapi. Apabila terdapat evaluasi penyuluhan, maka evaluasi ini lebih untuk memenuhi mekanisme birokrasi, bukan untuk evaluasi yang benar-benar dijadikan instrumen mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan sebagai umpan balik untuk reproduksi informasi berikutnya.

Keadaan ini membuat sistem komunikasi pemerintah seperti berjalan di tempat. Subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan memproduksi dan mereproduksi informasi yang sama berulang kali. Kadang informasi dari sistem tidak relevan dengan kompleksitas yang dihadapi, sementara kompleksitas lingkungan berkembang cepat meninggalkan sistem komunikasi pemerintah.

Subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan yang tidak optimal berinterelasi, bukan hanya mengakibatkan produksi informasi tidak efektif menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Informasi yang dihasilkan hanya menyelesaikan sebagian kompleksitasnya. Namun yang lebih substansial, masing-masing subsystem telah berubah menjadi 'sistem' di dalam sistem.

SIMPULAN

Sistem komunikasi pemerintah terdiri dari dua subsystem, yaitu subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan. Subsystem penyuluhan dijalankan oleh struktur KJF dan subsystem peternakan dijalankan oleh struktur Bidang Peternakan. Sistem komunikasi pemerintah menghadapi kompleksitas penyuluhan dan penjualan. Kompleksitas penyuluhan terdiri dari pelatihan PPL yang tidak sesuai

dengan kebutuhan PPL, pendirian VBC, penentuan kelas kemampuan poktan, pelaksanaan PWSB, evaluasi penyuluhan, biaya operasional BPK yang minim, dan keswan. Kompleksitas penjualan terdiri dari penjualan kambing Kaligesing yang sering merugikan peternak, dan penjualan susu kambing yang sulit.

Subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan belum optimal dalam berinterelasi ketika memproduksi dan mereproduksi informasi. Subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan masih sering berjalan sendiri-sendiri dalam memproduksi dan mereproduksi informasi, sehingga produksi informasi tidak sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi. Informasi berupa regulasi dari sistem komunikasi pemerintah tidak efektif menyelesaikan kompleksitas lingkungan.

Subsystem penyuluhan dan subsystem peternakan harus meningkatkan interelasi ketika memproduksi dan mereproduksi informasi. Kompleksitas lingkungan yang dihadapi menuntut interelasi kedua subsystem karena tidak bisa diselesaikan oleh subsystem secara sendiri-sendiri. Interelasi subsystem bisa dimulai dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman ketika memproduksi informasi, baik dalam menghadapi kompleksitas penyuluhan dan kompleksitas penjualan. Interelasi akan membuat masing-masing subsystem saling mengisi dan menguatkan dalam produksi dan reproduksi informasi. Informasi yang dihasilkan juga lebih efektif menyelesaikan kompleksitas lingkungan yang dihadapi.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP). (2009). *Buku pintar penyuluhan dan ketahanan pangan*. Purworejo, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Besio, C. & Pronzini, A. (2011). Inside organizations and out: Methodological tenets for empirical research inspired by systems theory. *Journal of Historical Social Research*, 36(1), 18-41.
- Bloor, M. & Wood, F. (2006). *Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts*. California, US: SAGE Publications Inc.
- Desautel, C. (2008). *Communication systems in high performing servanthood cultures* (Disertasi). Washington, USA: Gonzaga University.
- Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPPKP). (2012). *Profil peternakan kambing Kaligesing dan peternakan sapi di kabupaten Purworejo*. Purworejo, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2015). *Proposal usulan penetapan wilayah sumber bibit kambing Kaligesing (kambing PE) di kecamatan Kaligesing*. Purworejo, Indonesia: DPPKP kabupaten Purworejo.
- Griffin, EM. (2012). *A first look at communication theory* (8th ed). New York, US: McGraw Hill.
- Handaka, T., Wahyuni, H. I., Sulastri, E. & Wiryono, P. (2015). Social capital and communication systems of ettawa goat breeders in Purworejo regency. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Cultural*, 7(2), 307-315.
- (2016). The complexity of government communication system in Ettawa Crossbred (EC) goat farming in Purworejo. *Mimbar: Social and Development Journal*, 3(1), 88-96.
- Han, J. Y. (2008). Examining effective use of an interactive health communication system (IHCS) (Dissertation). Madison, USA: University of Wisconsin.
- Hardiman, F. B. (2008). Teori sistem Niklas Luhmann. *Jurnal Filsafat Driyarkara*, 29(3), 1-12.
- Hartley, J. (2004). Case study research. In C. Cassell & G. Symon. *Essential guide to qualitative methods in organizational research* (h. 323-333). London: SAGE Publications Ltd.
- Heriyadi, D. (2004). *Standardisasi mutu bibit kambing Peranakan Ettawa*. Bandung, Indonesia: Kerjasama antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung.
- Holton, C. F. (2009). *The impact of computer mediated communication (CMC) systems monitoring on organizational communications content*. Disertasi. University of Wisconsin, Madison, US.
- Jones, S. R., Torres, V. & Arminio, J. (2006). *Negotiating the complexities of qualitative research in higher education: Fundamental elements and issues*. New York, US: Routledge.
- Kaliky, R. (2012). *Kajian sistem penyuluhan pertanian di provinsi Maluku*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- King, M. & Thornhill, C. (Eds.). (2006). *Luhmann on law and politics: Critical appraisals and applications*. Oxford, UK: Hart Publishing.
- Lee, D. (2000). The society of society: The grand finale of Niklas Luhmann. *Journal of Sociological Theory*, 18 (2), 320-330.
- Lestari, P., Sembiring, I. D. P. Br., Prabowo, A., Wibawa, A. & Hindariningrum, R. (2013). Manajemen komunikasi bencana gunung Sinabung 2010 saat tanggap darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 139-157.
- Littlejohn, S. W. & Foss, K. A. (2008). *Theories of human communication* (9th ed). California, US: Thomson Wadsworth.
- (2009). *Encyclopedia of communication theory*. California, US: SAGE Publications, Inc.
- Luhmann, N. (1989). *Ecological communication*. Diterjemahkan oleh John Berdnarz, Jr. Chicago, US: The University of Chicago Press.
- (1992). What is communication. *Journal of the International Communication Association*, 2(3), 251-259.
- (1995). *Social systems*. Diterjemahkan oleh John Bednarz, Jr. with Dirk Baecker. Stanford, US: Stanford University Press.

- (2000). *The reality of the mass media*. Diterjemahkan oleh Kathleen Cross. California, US: Stanford University Press.
- (2002). *Theories of distinction: Redescribing the description of modernity*. Diterjemahkan oleh Joseph O'Neil (et al.). California, US: Stanford University.
- McKie, L. (2002). Engagement and evaluation in qualitative inquiry. In Tim May (Ed.), *Qualitative research in action* (h. 261-285). London, UK: SAGE Publications Ltd.
- Nobles, R. & Schiff, D. (2004). A story of miscarriage: Law in the media. *Journal of Law and Society*, 31(2), 221-244.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed). California, US: SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Bupati Purworejo No. 91 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo. (2013). Purworejo, Indonesia: DPPKP.
- Rothchild, J. (2009). Law, religion, and culture: The function of system in Niklas Luhmann and Kathryn Tanner. *Journal of Law and Religion*, 24(2), 475-506.
- Sambodo, J. S. (2 Mei, 2013). Potensi susu kambing PE belum tergarap. *Koran Kedaulatan Rakyat*.
- Schostak, J. (2006). *Interviewing and representation in qualitative research*. London, UK: Open University Press.
- Sitorus, F. K. (2008). Masyarakat sebagai sistem-sistem *autopoiesis*: Tentang teori sistem sosial Niklas Luhmann. *Jurnal Filsafat Driyarkara*, 29(3), 17-36.
- Stark, S. & Torrance, H. (2005). Case study. In Bridget Somekh & Cathy Lewin. *Research methods in the social sciences* (h. 33-40). London, UK: SAGE Publications Ltd.
- Viskovatoff, A. (1999). Foundations of Niklas Luhmann's theory of social systems. *Journal of Philosophy of the Social Sciences*, 29(4), 481-516.
- von Groddeck, V. (2011). The case of value based communication: Epistemological and methodological reflections from a system theoretical perspective. *Journal of Historical Social Research*, 36(1), 66-86.
- Yamin, A. (2015). *Perilaku petani dalam merespons kebijakan harga gabah di kabupaten Bantul*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

